

5 Ribu Awak Media Bakal Disuntik Vaksin Covid-19 Akhir Februari

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa dirinya mengetahui banyak awak media ingin divaksin.

Dia pun menyatakan bahwa pemerintah telah mengalokasikan sebanyak 5.000 vaksin Covid-19 untuk awak media pada akhir bulan ini.

"Saya yakin banyak awak media yang sudah ingin divaksin. Tapi saya udah bisik-bisik ke Prof Nuh untuk awal nanti di akhir bulan Februari sampai awal Maret nanti untuk awak media sudah kita siapkan kira-kira 5.000 orang untuk bisa

divaksin," ujarnya saat Puncak Peringatan Hari Pers Nasional di Istana Negara, Selasa (9/2).

"Ini termasuk pertama nanti keluar dari Bio Farma 12 juta, kita berikan 5.000 untuk awak media," lanjutnya.

Dia mengatakan, saat ini pemerintah masif fokus untuk menuntaskan vaksinasi bagi tenaga kesehatan dan juga pelayan masyarakat.

"Dan juga para pelayan masyarakat. Termasuk pedagang pasar yang menjadi garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat," tuturnya. ● mei

Terkait Penetapan Bupati Terpilih, KPU Sabu Raijua Digugat ke PTUN

KUPANG (IM) - Pasangan calon bupati Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) nomor urut 3, Takem Raja Pono-Herman Hegi Radja Haba (TRP-HEGI), menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat. Gugatan itu dilayangkan tim kuasa hukum pasangan calon tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang, Senin (8/2).

Kuasa Hukum Takem Raja Pono-Herman Hegi Radja Haba, Rudi Kabunang mengatakan, gugatan ini menyusul penetapan Orient Riwu Kore-Thobias Uly (IE-RAI), sebagai bupati dan wakil bupati terpilih. Belakangan diketahui, Orient memegang paspor Amerika Serikat.

"Tadi siang kita sudah masukan gugatan ke PTUN Kupang itu dengan nomor perkara 216/2021/PTUN Kupang," ungkap Rudi, Senin (8/2).

Rudi menyebut, materi gugatan yang didaftarkan adalah masalah pemilihan bupati dan wakil bupati Sabu Raijua dengan dugaan salah satu calon, diduga berkecenderungan Amerika Serikat. Setelah mengantongi bukti dan informasi dari Kedutaan Besar Amerika Serikat, pihaknya mengajukan gugatan ke PTUN Kupang.

La mengatakan, berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika menerima kewarganegaraan atau paspor dari negara lain. Sementara, dalam Undang-Undang Pilkada, diatur calon kepala daerah harus warga negara

Indonesia. "Ini mutlak, proses pilkada telah selesai baru kita dapatkan informasi tentang hal ini, jadi satu-satunya jalan adalah gugat ke PTUN," kata Rudi.

Tujuan gugatan ini, kata Rudi, agar majelis hukum memutuskan penetapan bupati Sabu Raijua terpilih dinyatakan batal.

"Permohonan kami juga agar PTUN Kupang menyatakan pilkada ulang. Saya tetap mengajukan permohonan dalam gugatan ini, agar hakim memutuskan adanya pilkada ulang," jelasnya.

Sebelumnya, Bawasu Kabupaten Sabu Raijua menyebut bupati terpilih Kabupaten Sabu Raijua, Orient Patriot Riwu Kore, merupakan warga negara Amerika Serikat. Hal itu terungkap setelah Bawasu Sabu Raijua menerima balasan surat elektronik dari Kedubes Amerika Serikat mengenai status kewarganegaraan Orient Patriot Riwu Kore, pada 1 Februari 2021.

Sementara itu, Ketua KPU Sabu Raijua Kirenius Padij mengatakan, saat mendaftar sebagai peserta pilkada di daerah itu, Orient menyerahkan kartu tanda penduduk (KTP) warga negara Indonesia dan beralamat di Kota Kupang.

KPU Sabu Raijua juga mengklarifikasi keabsahan KTP itu ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Kupang. Surat klarifikasi dari Dukcapil Kota Kupang itu dikeluarkan pada 16 September 2020. Surat itu ditandatangani oleh Kepala Dukcapil Kota Kupang Agus Ririmase. ● mei

Tol Cipali Amblas, Perbaikan Diperkirakan Selesai 20 Hari

JAKARTA (IM) - Badan Jalan Tol Cikampek-Palimanan (Cipali) KM 122 amblas dan mengalami penurunan. Kejadian tersebut sempat membuat arus lalu lintas menuju Jakarta menjadi terhambat.

Penurunan badan jalan tersebut dilaporkan petugas Tol Cipali dalam video yang beredar di media sosial. Dalam video tersebut, badan jalan Tol Cipali KM 122 amblas sepanjang 20 meter dengan kedalaman 1 meter. "Terpantau telah terjadi penurunan badan jalan dari lajur satu dan bahu jalan, sekitar panjang 20 meter, sementara lajur digunakan satu lajur," jelas suara dalam video tersebut.

Hingga kini petugas masih memberlakukan satu lajur jalan untuk kendaraan yang menuju Subang dan Bandung. Belum ada informasi lebih lanjut terkait penanganan dan informasi detail.

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menyatakan, kemungkinan perbaikannya akan selesai dalam 20 hari.

"Diperkirakan perbaikan jalan Tol Cipali Km 122 akan berlangsung selama 20 hari. Karena itu kami menghimbau para pengguna jalan tol Cipali untuk berhati-hati, karena di lokasi pastilah terjadi perlambatan," kata Istiono, saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa (9/2).

Saat ini, polisi juga telah menerapkan kebijakan rekayasa lalu lintas berupa Contraflow di Tol Cipali setelah amblasnya jalan di KM 122.

"Kami sudah menempatkan petugas dan melakukan contra flow sepanjang 9 KM di jalur sebelahnya untuk mencegah kemacetan semakin parah. Kami juga sudah berkoordinasi dengan pengelola jalan tol Cipali," ujar Istiono. ● han

2 | Polhukam

IDN/ANTARA



RAPAT BASARNAS DAN BMKG DENGAN DPR

Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP)/Basarnas Marsekal Muda TNI Henri Alfandi (kiri) bersama Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengikuti rapat dengan pendapat dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/2). Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2020 dan program kerja BMKG dan Basarnas tahun 2021.

Ada Beberapa Kekurangan Bila Pilkada Tetap Digelar Tahun 2024

Jika pilkada tidak dilaksanakan pada 2022 dan 2023 akan membuat masyarakat tidak bisa mendapatkan haknya untuk memperoleh pemimpin definitif tepat setelah masa jabatan kepala daerah habis.

JAKARTA (IM) - Pendiri sekaligus peneliti Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay menilai, ada sejumlah kekurangan apabila pemilihan

kepala daerah (Pilkada) tetap dilaksanakan tahun 2024.

Pertama, kata dia, pelaksanaan pilkada yang berbarengan dengan pemilu nasional akan menambah beban kerja penyelenggara pemilu.

"Nah kalau ada pemilihan besar semua dijadikan satu, di dalam waktu yang berdekatan, itu sebetulnya akan sangat merepotkan, pekerjaan ya akan sangat sulit," kata Hadar,

Senin (8/2).

Jika beban kerja terlalu besar, Hadar menyebut, hal itu berpotensi membuat penyelenggara pemilu tidak bisa menjalankannya dengan baik. Sehingga nantinya akan berpengaruh pada kualitas penyelenggaraan pemilu nantinya.

Kekurangan kedua yaitu masyarakat menjadi bingung karena ada banyak pilihan yang harus mereka pilih. Selain itu, jika dilaksanakan berbarengan dengan pemilu nasional, pemilu daerah akan kehilangan sorotan masyarakat.

"Belum lagi biasanya pemilu presiden itu akan lebih banyak menarik banyak perhatian," ujarnya. "Ramenya itu pemberitaan kegiatannya itu pemilihan presiden yang lebih ramai. Sehingga perhatian semua pihak ke arah sana," ujarnya.

Kekurangan lainnya adalah jika pilkada dan pemilu serentak dilaksanakan serentak pada 2024 masyarakat tidak bisa melakukan evaluasi pemerintahan. Hadar menuturkannya, meski pelaksanaan pilkada dan pemilu nasional dilaksanakan di bulan yang berbeda tetap saja tidak cukup waktu untuk melakukan evaluasi.

"Jadi adanya jeda dari satu pemilihan ke yang lain itu bisa memberi ruang bagi pemilih yang punya kedaulatan penentu ini untuk melakukan evaluasi dan memastikan

pilihan yang terbaik buat dia," ungkapnya.

Selain itu, Hadar juga menilai, jika pilkada tidak dilaksanakan pada 2022 dan 2023 akan membuat masyarakat tidak bisa mendapatkan haknya untuk memperoleh pemimpin definitif tepat setelah masa jabatan kepala daerah habis.

la memahami bahwa masa jabatan yang tengah kosong tersebut bisa diisi oleh penganggunan daerah, namun pengisian jabatan tersebut justru berpotensi menimbulkan masalah baru.

"Kepala daerah yang pejabat itu biasanya kepala daerah yang double-double jabatannya misalnya seorang dirjen dia dikasih pejabat di mana," ujarnya.

"Jadi dia juga tidak bisa fokus biasanya, jadi itu tidak terlalu baik juga sebetulnya. Kecuali darurat betul ya," ucap dia.

Adapun di dalam pembahasan revisi UU Pemilu, terdapat wacana untuk menormalkan jadwal pilkada menjadi tahun 2022-2023 yang awalnya akan dilaksanakan tahun 2024.

Penormalan itu rencananya akan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang tengah dibahas oleh DPR.

Namun kini, beberapa fraksi justru menarik keinginannya untuk melakukan revisi UU Pemilu. ● han

Prabowo Ingin Kader Gerindra Bersikap Seperti Pendekar

JAKARTA (IM) - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto meminta kader Partai Gerindra untuk tetap bersikap rendah hati meski kini partai tersebut bagian dari koalisi pemerintah. Prabowo pun meminta kader-kadernya agar bersikap seperti seorang pendekar, yang berani, setia, dan teguh, tetapi tetap rendah hati.

"Semakin diberi kepercayaan, semakin kita rendah hati. Ingat ilmu nenek moyang kita, ilmu pendekar, ilmu padi, semakin berisi semakin

menunduk," kata Prabowo dalam acara HUT ke-13 Partai Gerindra, Sabtu (6/2), seperti dikutip dari video yang diunggah akun Youtube Gerindra TV, Selasa (9/2).

Prabowo juga mengingatkan agar Gerindra menjadi partai yang tidak memelihara kebencian dan dendam. Ia mengatakan, seorang pendekar tidak boleh dendam dan benci.

"Hilangkan kebencian dari hati kita, isi hati kita dengan semangat, dengan cinta Tanah Air, cinta rakyat. Saudara-saudara sekalian, isi hati kita

dengan optimisme kegembiraan, keberanian menghadapi tantangan," kata Prabowo.

Menteri Pertahanan itu pun mengakui Partai Gerindra mendapat sorotan saat tergabung dalam koalisi. Ia pun menilai Partai Gerindra akan selalu ditentang. Oleh sebab itu, Prabowo meminta setiap kadernya untuk selalu waspada.

"Harus selalu 'eling' dan waspada. Ingat, ingat, tidak boleh lupa diri, tidak boleh keagungan, tidak boleh besar kepala," kata Prabowo. ● han



MENTERI PPPA MENINJAU PEMULANGAN PENGUNSI LERENG MERAPI Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati (kdua kanan) menyapa pengungsi Gunung Merapi saat pemulangan di barak pengungsian Purwobinangun, Pakem Sleman, D.I Yogyakarta, Selasa (9/2). Ratusan warga Turgo yang mengungsi sejak dua pekan lalu kembali ke rumah menyusul rekomendasi jarak aman bahaya erupsi Gunung Merapi dari BPPTKG.

Penyidik KPK Periksa 4 Orang Saksi Terkait Kasus Suap Wali Kota Cimahi

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa empat orang saksi terkait kasus suap izin pembangunan Rumah Sakit Umum Kasih Bunda yang menyeret nama Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna.

"Yang bersangkutan didalam pengetahuannya sebagai saksi AJM (Ajay Muhammad Priatna) terkait dugaan suap dalam perizinan di Kota Cimahi Tahun Anggaran 2018-2020," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan pada Selasa (9/2).

Tiga dari saksi tersebut merupakan pihak swasta, yakni Rudi Setiawan dari CV Indra Nugraha yang didalam pengetahuannya terkait dengan berbagai proyek yang diduga dikelola oleh Ajay.

Kemudian, Ridwan, seorang karyawan PT Trisakti Manunggal Perkasia Internasional. Dia ditanya penyidik KPK terkait adanya persentase penghitungan keuntungan atas berbagai proyek di Kota Cimahi yang dikerjakan oleh perusahaannya yang diberikan kepada tersangka Ajay. Lalu, ada juga nama Tetep Hidayat yang dikonfirmasi terkait dengan kepemilikan aset tersangka Ajay.

Lebih lanjut, Ali mengatakan, KPK juga memeriksa Plt Direktur Utama RSUD Cibabat Cimahi Reri Marliah. "Reri didalam pengetahuannya terkait berbagai proyek yang dilaksanakan di RSUD Cimahi yang pelaksanaannya diduga menggunakan bendera dan dikelola oleh perusahaan milik tersangka AJM (Ajay Muhammad

Priatna)," kata Ali.

Dalam kasus ini, Ajay diduga meminta uang sebesar Rp 3,2 miliar kepada Komisaris Rumah Sakit Umum (RSU) Kasih Bunda Hutama Yonathan (HY) untuk mengizinkan pembangunan gedung KPK menduga Ajay telah menerima Rp 1,661 miliar dari uang yang dijanjikan tersebut.

Atas perbuatannya, Ajay selaku penerima suap disangka melanggar Pasal Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan atau Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun Hutama selaku pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ● mei



UJI KETERAMPILAN DAN FISIK PRAJURIT KORPS MARINIR

Prajurit Korps Marinir berlari dengan mengenakan helm tempur dan memikul senjata saat mengikuti lomba triathlon di Bumi Marinir, Cilandak, Jakarta, Selasa (9/2). Lomba triathlon dalam rangka HUT ke-17 Pasmar-1 Korps Marinir dengan materi lomba cross country enam kilometer, renang militer 50 meter, dan menembak senapan jarak 100 meter tersebut diikuti 16 satuan yang terdiri dari lima orang per satuan (satu perwira, satu bintang, dan tiga tamtama) dengan tujuan menguji keterampilan dan fisik prajurit Korps Marinir.

PENGUMUMAN
Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Para Pesero CV PUNDI UDANG EMAS (dalam Likuidasi), berkedudukan di Tutang Bawang, tanggal 5 Februari 2021 Nomor 7, yang dibuat dihadapan Martina, SH, Notaris di Jakarta, telah diputuskan:
1. Menyetujui pembubaran/likuidasi Perseroan;
2. Menunjuk Bp. HENDI YANTO Efendy sebagai likuidator Perseroan;
3. Memberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Likuidator untuk menyelesaikan aset-aset dan segala kewajiban Perseroan.
Segala keberatan dan sanggahan dapat diajukan kepada:
Bp. HENDI YANTO Efendy
d/a Puri Matani 1 Lantai G
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. H1-H2
Kel. Karet, Kec. Setiabudi
Jakarta Selatan
Jakarta, 10 Februari 2021
Likuidator

PENGUMUMAN
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasi sebagai Setoran Saham, kami Direksi PT ZTE Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa:
Berdasarkan akta Keputusan Para Pemegang Saham PT ZTE INDONESIA tertanggal 5 Februari 2021 Nomor 2, dibuat di hadapan AUDREY TEDJA, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, telah disetujui oleh para pemegang saham:
1. Pengetahuan modal dasar menjadi sebesar Rp 380.016.000.000,- dan modal ditempatkan serta disetor menjadi sebesar Rp 380.016.000.000,-;
2. Pengetahuan modal ditempatkan dan disetor tersebut diambil kembali oleh para pemegang saham dengan perjanjian sebagai berikut:
a. sebesar Rp 20.416.000.000,- merupakan setoran modal sebelumnya;
b. sebesar Rp 359.600.000.000,- penyetorannya dilakukan oleh ZTE (HK) Limited dengan cara konversi utang Perseroan kepada ZTE (HK) menjadi saham berdasarkan Perjanjian Penjualan Piutang tertanggal 20 Januari 2021 dan Perjanjian Konversi Utang Menjadi Saham tertanggal 20 Januari 2021.
Jakarta, 10 Februari 2021
PT ZTE INDONESIA
Direksi